

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Deskripsi Pustaka

##### 1. Manajemen Kurikulum Muatan Lokal

###### a. Pengertian Manajemen Kurikulum Muatan Lokal

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Manajemen bisa diartikan sebagai seni, ilmu dan profesi. Follet mengartikan “manajemen sebagai seni, karena untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, seorang manajer harus bisa mengatur dan menggerakkan orang untuk melakukan tugas-tugasnya”. Dikatakan sebagai ilmu oleh Gulick karena “manajemen dipandang sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang secara sistematis berusaha memahami dan bagaimana orang bekerjasama. Dikatakan suatu profesi karena untuk menjadi manajer seseorang membutuhkan keahlian khusus dan profesional”.<sup>1</sup>

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Menurut Saylor dan Lewis (1974) kurikulum merupakan segala upaya sekolah untuk memengaruhi siswa agar dapat belajar, baik dalam ruangan kelas maupun diluar kelas.

Manajemen kurikulum adalah sebagai suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematis dalam rangka mewujudkan keterampilan tujuan kurikulum. Dalam pelaksanaannya, manajemen kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan konteks zamannya mulai dari Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan Kemudian Sekarang Menjadi Kurikulum 2013. Oleh karena itu otonomi yang diberikan kepada lembaga pendidikan atau sekolah dalam mengelola kurikulum

---

<sup>1</sup> Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2004, hlm. 1

secara mandiri dengan memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian sasaran dalam visi dan misi lembaga pendidikan atau sekolah tidak mengabaikan kebijaksanaan nasional yang telah ditetapkan.<sup>2</sup>

Beragam pandangan telah dikemukakan sejumlah pakar. Namun, dalam bagian ini hanya akan dikemukakan beberapa definisi yang telah diajukan. Tirtaraharjda dan La Sula, sebagaimana di kutip Iim Wasliman mengungkapkan bahwa kurikulum muatan lokal adalah “...suatu program pendidikan yang isi dan media dan strategi penyampaianya dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah”<sup>3</sup> isi yang dimaksud adalah materi pelajaran yang dipilih dan lingkungan dan dijadikan program untuk dipelajari oleh murid di bawah bimbingan guru guna mencapai tujuan muatan lokal. Media penyampaian ialah metode dan berbagai alat bantu pembelajaran yang digunakan dalam menyajikan isi muatan lokal. Jadi isi program dan media penyampaian muatan lokal diambil dan menggunakan sumber lingkungan yang dekat dengan kehidupan peserta didik.

Mulyasa dalam bukunya yang berjudul Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan menyebutkan bahwa kurikulum muatan lokal adalah kegiatan kurikuler yang mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada.<sup>4</sup> Substansi muatan lokal ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan. Pendapat ini tampaknya menganggap bahwa kurikulum muatan lokal hanya bisa diakomodasi melalui kegiatan yang terpisah dengan mata pelajaran.

---

<sup>2</sup> Rusman, *Manajemen Kurikulum*, PT Raja Graindo, Bandung, 2009, hlm. 3

<sup>3</sup> Muhammad Natsir, *Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal*, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, STAIN Samarinda, 2013, hlm. 3

<sup>4</sup> Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Kemandirian guru dan Kepala Sekolah Cet. ke-3*, PT Bumi Aksara, Jakarta 2009, hlm. 256.

Muatan lokal diorientasikan untuk menjembatani kebutuhan keluarga dan masyarakat dengan tujuan pendidikan nasional. Dapat pula dikemukakan, mata pelajaran ini juga memberikan peluang kepada siswa untuk mengembangkan kemampuannya yang dianggap perlu oleh daerah yang bersangkutan. Oleh sebab itu, mata pelajaran muatan lokal harus memuat karakteristik budaya lokal, keterampilan, nilai-nilai luhur budaya setempat dan mengangkat permasalahan sosial dan lingkungan yang pada akhirnya mampu membekali siswa dengan keterampilan dasar sebagai bekal dalam kehidupan (*life skill*).

Dengan demikian, kurikulum muatan lokal adalah seperangkat rencana dan dengan keadaan dan kebutuhan daerah masing-masing serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Muatan lokal merupakan bagian dari struktur dan muatan kurikulum yang terdapat pada standar isi di dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan.

#### b. Tujuan Kurikulum Muatan Lokal

Menurut Muhaimin, pengembangan kurikulum muatan lokal di Madrasah bertujuan mengembangkan potensi daerah sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan di Madrasah serta mengembangkan potensi Madrasah sehingga keunggulan kompetitif.<sup>5</sup> Dengan kurikulum ini diharapkan, siswa di madrasah tidak tercerabut dari budaya, tradisi dan karakteristik masyarakat yang mengitarinya.

Pandangan Muhaimin di atas searah dengan penganut filsafat rekonstruksi sosial yang beranggapan bahwa kurikulum madrasah seharusnya memberi pengaruh terhadap reformasi masyarakat dan

---

<sup>5</sup> Muhaimin, *Pengembangan Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di Sekolah dan Madrasah, Edisi I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 94

membantu masyarakat untuk menjadi lebih baik.<sup>6</sup> Ada tiga standar rekonstruksi sosial yang dikemukakan berdasarkan literature. Ketiga standar ini memiliki tujuan yang berbeda yaitu;

- 1) Adaptasi sosial yang beranggapan bahwa kurikulum sekolah itu seharusnya menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat.
- 2) Rekonstruksi sosial berarti adanya tuntutan untuk dilakukan perubahan kurikulum dengan melihat kepentingan masyarakat dan dilakukan sesegera mungkin.
- 3) Perspektif masa depan yaitu pandangan yang spekulatif yang menganggap sekolah itu seperti bengkel untuk menemukan kebutuhan masyarakat. Intinya adalah kurikulum sekolah dianggap sebagai wahana untuk perencanaan masa depan. Pendukung konsep ini menganggap bahwa isi atau materi kurikulum adalah hasil seleksi kebutuhan masyarakat, isu-isu sosial, ide-ide mutakhir dan aspirasi masa depan, isu-isu lingkungan, isu lingkungan, perdamaian dunia dan lain-lain.

Dapat pula dikemukakan, melalui penerapan kurikulum muatan lokal dapat memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku siswa, berupa wawasan tentang keadaan lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Dengan bekal tersebut diharapkan siswa mampu mengembangkan serta melestarikan sumber daya alam dan kebudayaan yang ada di sekelilingnya. Tujuan lain dari pemberian pengajaran muatan lokal adalah agar pengembangan sumber daya manusia yang terdapat di daerah setempat dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan. Substansi kurikulum muatan lokal dapat ditentukan oleh satuan pendidikan yang tidak hanya terbatas pada mata pelajaran keterampilan, tetapi pembentukan sikap yang mencerminkan pengejawantahan nilai-nilai sosio-kultural merupakan bagian penting yang harus diberikan tempat dalam penerapan

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 94

kurikulum muatan lokal pada pendidikan formal. Secara lebih khusus, kurikulum muatan lokal bertujuan.

- 1) Mengenalkan dan mengakrabkan peserta didik dengan lingkungan alam, sosial, dan budayanya.
- 2) Membekali peserta didik dengan kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan mengenai daerahnya yang berguna bagi dirinya maupun lingkungan masyarakat pada umumnya.
- 3) Memiliki sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai atau aturan-aturan yang berlaku di daerahnya, serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya setempat dalam rangka menunjang pembangunan nasional serta.
- 4) Menyadari lingkungan dan masalah-masalah yang ada di masyarakat serta dapat membantu mencari pemecahannya.<sup>7</sup>

c. Landasan Kurikulum Muatan Lokal

Masyarakat merupakan dunia sekitar yang paling kompleks, selalu berubah dan dinamis. Interaksi antara individu yang satu dengan yang lain saling aktif, sehingga agar interaksi tersebut dapat berjalan dengan tertib maka diadakan norma-norma, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis (adat- istiadat). Dalam pergaulan inilah masing-masing individu saling mendewasakan diri, dimana yang satu dengan yang lainnya saling *to take and to give*.

Pelaksanaan kurikulum muatan lokal dalam konteks pendidikan Indonesia, relatif baru. Landasan yuridis pelaksanaan kurikulum muatan lokal mengacu pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0412/U/1987. Sebagai penjabarannya tertuang dalam Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar Menenengah Nomor 173/-C/ Kep/M/1987.<sup>8</sup> Dalam perkembangannya kemudian, keberadaan muatan lokal bertambah kuat dengan dijadikannya muatan lokal sebagai salah satu isi dan struktur kurikulum yang harus diberikan

---

<sup>7</sup> Muhammad Natsir, *ibid*, hlm. 12

<sup>8</sup> S. Dakir, *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum*, Rhineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 101



pada tingkat dasar dan menengah. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 UU No. 20 Thn 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa Sekolah Dasar dan Menengah terdiri dari mata pelajaran pendidikan agama; pendidikan kewarganegaraan, bahasa; matematika; ilmu pengetahuan alam; Ilmu Pengetahuan Sosial; Seni dan Budaya; Pendidikan Jasmani dan Olah raga; Keterampilan /Kejuruan; dan muatan lokal.<sup>9</sup>

Selanjutnya, Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah membahas tentang muatan lokal kurikulum 2013 dengan maksud;

- a) Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
- b) Satuan pendidikan adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK).

Muatan lokal merupakan bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya.<sup>10</sup>

Landasan lain dari pengembangan kurikulum muatan lokal di Madrasah adanya kebijakan desentralisasi atau otonomi pendidikan.<sup>11</sup> yang diberlakukan di Indonesia. Secara teori, Nana Syaodih menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *decentralized curriculum managemen* adalah kurikulum yang disusun dan dikelola oleh daerah,

---

<sup>9</sup> UU Sisdiknas No. 200 Th. 2003 Pasal 37 ayat 1.

<sup>10</sup> Permendikbud, Nomor 79 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013, Jakarta, 2014. hlm.

<sup>11</sup> Muhammad Natsir, *Ibid*, hlm. 14

kurikulum daerah, lokal, sekolah /Madrasah yang berlaku di daerah atau sekolah tertentu, tujuan, isi, pembelajaran, evaluasi disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, karakteristik dan perkembangan setempat dan kelender pengajaran berbeda, ujian bersifat daerah atau lokal.<sup>12</sup>

Model kurikulum ini dalam beberapa literatur dikenal dengan istilah pengembangan kurikulum berbasis madrasah. Pengembangan kurikulum berbasis Madrasah dapat didefinisikan sebagai upaya pengembangan kurikulum dengan menggunakan pendekatan *botton up or school based curriculum* yang memberi peluang secara utuh kepada Madrasah untuk melakukan pengembangan kurikulum berbasis muatan lokal.

Pendapat lain mengemukakan pengertian pengembangan kurikulum berbasis Madrasah sebagai suatu proses yang dilakukan oleh beberapa atau keseluruhan anggota masyarakat madrasah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian terhadap satu atau beberapa aspek kurikulum yang dilakukan secara selektif, adaptif dan kreatif.

Dalam proses pengembangan kurikulum, para guru dilibatkan dalam bentuk partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengembangan dan pelaksanaan kurikulum madrasah.

- 1) Melibatkan seluruh komponen sekolah yang meliputi kepala sekolah, guru, staff, masyarakat, siswa dan lain-lain.
- 2) Pengembangan kurikulum bersifat selektif, adaftif dan kreatif.
- 3) Adanya pergeseran tanggungjawab pengambilan keputusan kurikulum dengan tidak memutuskan garis hubungan sekolah dengan pusat.
- 4) Bersifat terus menerus dan dinamis yang secara ideal melibatkan guru, tenaga kependidikan lainnya, masyarakat, orang tua dan siswa.

---

<sup>12</sup> Nana Syaodih, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008, hlm. 78

- 5) Melibatkan kebutuhan dukungan struktur yang bervariasi
- 6) Adanya sebuah perubahan peran guru yang bersifat tradisional yang hanya bertugas sebagai pengajar menjadi peneliti dan pengembang kurikulum.<sup>13</sup>

d. Fungsi Manajemen Kurikulum

Kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan. Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktifitas pendidikan demi tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Kurikulum juga merupakan suatu rencana pendidikan, memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis, lingkup, dan urutan isi serta proses pendidikan.

Fungsi kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan. Tujuan yang dimaksud disini adalah tujuan pendidikan yang telah diadakan pada sebuah lembaga pendidikan baik formal maupun nonformal.<sup>14</sup> Adapun fungsi kurikulum ditinjau dari obyeknya adalah :

1) Fungsi kurikulum bagi guru

Fungsi kurikulum bagi guru adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan proses pembelajaran. Bagi guru, sebelum mengajar pertama-tama yang perlu dipertanyakan adalah kurikulumnya. Setelah kurikulum didapat, kemudian guru mencari Silabus dan selanjutnya rencana pelaksanaan pembelajaran, dan selanjutnya barulah guru mencari berbagai sumber bahan yang relevan atau yang telah ditentukan oleh Depdiknas. Sesuai dengan fungsinya bahwa kurikulum adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, maka guru harus mencermati tujuan pendidikan yang akan dicapai oleh lembaga pendidikan tempat guru tersebut bekerja.

2) Fungsi kurikulum bagi kepala sekolah

Fungsi kurikulum bagi kepala sekolah adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan supervisi kurikulum terhadap para

---

<sup>13</sup> Muhammad Nasir, *Ibid*, hlm. 9

<sup>14</sup> Dakir, *Perencanaan & Pengembangan Kurikulum*, *Ibid*, hlm. 12



guru pemegang mata pelajaran. Bagi kepala sekolah baru, yang dipelajari pertama kali adalah tujuan lembaga yang akan dipimpinnya. Kemudian kepala sekolah baru tersebut mencari kurikulum yang berlaku sekarang untuk dipelajari, terutama pada buku petunjuk pelaksanaan.

Selanjutnya kepala sekolah bertugas melaksanakan supervisi atau bimbingan pengarah kurikulum pada para guru, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam proses belajar mengajar dan meningkatkan hasil belajar siswa.

3) Fungsi kurikulum bagi masyarakat

Fungsi kurikulum bagi masyarakat adalah mendorong sekolah agar dapat menghasilkan berbagai tenaga yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kurikulum merupakan alat produsen dari sekolah, sedangkan masyarakat adalah konsumennya. Antara kurikulum sebagai produsen dengan masyarakat sebagai konsumennya harus sinkron.

## 2. Proses Pembentukan Kurikulum

Sebagai tahap awal pengembangan kurikulum, proses pembentukan kurikulum meliputi tiga kegiatan yaitu : Perencanaan strategis (*strategic planning*), perencanaan program (*program planning*), dan perencanaan kegiatan pembelajaran (*program delivery plans*).

a. Perencanaan strategis

Perencanaan strategis disini dipahami sebagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka perumusan standar kompetensi, penetapan isi dan struktur program, serta penyusunan strategi pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan. Kegiatan ini dikoordinasikan oleh ketua yayasan dengan anggota-anggota yayasan, kepala sekolah, bidang kurikulum dan komite sekolah, dengan meminta input dari

berbagai kelompok, baik yang ada dalam lembaga yang bersangkutan maupun dari luar.<sup>15</sup>

Perumusan standar kompetensi, tugas para perancang kurikulum adalah menentukan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan yang diharapkan dimiliki oleh peserta didik setelah mereka menyelesaikan keseluruhan program pendidikan di suatu lembaga pendidikan. Adapun yang menjadi sumber utama dalam perumusan standar kompetensi ini adalah aliran filsafat yang diikuti, visi dan misi lembaga, harapan-harapan masyarakat, peraturan dan kebijakan pemerintah tentang pendidikan, serta tuntutan dunia usaha dan dunia kerja. Selain itu, para perancang kurikulum hendaknya merumuskan tujuan institusional sedemikian rupa sehingga mencerminkan produk dari lembaga pendidikan tersebut. Dengan demikian akan tampak jelas produk (lulusan) dari lembaga pendidikan yang bersangkutan, karena ciri tertentu yang dimilikinya.

Kegiatan lain dalam perencanaan strategis adalah penetapan isi dan struktur program. Dalam kegiatan penetapan isi, tugas para perancang kurikulum adalah menetapkan mata pelajaran-mata pelajaran yang akan diajarkan pada suatu lembaga pendidikan. Adapun yang menjadi rujukan dalam penetapan mata pelajaran-mata pelajaran yang akan diajarkan adalah rumusan visi, misi dan standar kompetensi yang telah ditetapkan. Kemudian dalam kegiatan penetapan struktur program, tugas para perancang kurikulum adalah menetapkan jenis-jenis program pendidikan, sistem semester, jumlah mata pelajaran dan alokasi waktu yang diperlukan.

Kegiatan terakhir dalam perencanaan strategis adalah penyusunan strategi pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan. Dalam kegiatan ini tugas para perancang kurikulum adalah memilih, menyusun, dan memobilisasikan segala cara, tenaga, dan sarana untuk mencapai visi, misi dan standar kompetensi secara efektif dan efisien.

---

<sup>15</sup> Rusman, *Manajemen Kurikulum*, hlm. 124

Untuk kepentingan ini, kegiatan yang harus direncanakan meliputi : pelaksanaan pengajaran, pelaksanaan penilaian, kegiatan bimbingan dan penyuluhan, serta administrasi akademik dan umum.

b. Perencanaan program

Perencanaan program disini dipahami sebagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyusun kompetensi dasar dan menetapkan materi atau pokok bahasan pada setiap mata pelajaran. Pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan program ini adalah bidang kurikulum, kepala sekolah, dan beberapa guru yang dipilih terutama yang diipilih berdasarkan keahlian disiplin ilmu dan kinerjanya.<sup>16</sup>

Perencanaan program ini, perancang kurikulum bertugas menyusun dan merumuskan kompetensi dasar. Kompetensi dasar dirumuskan untuk setiap mata pelajaran yang akan dicapai selama program mata pelajaran tersebut diajarkan. Dalam perumusan kompetensi dasar ada baiknya para perancang kurikulum memperhatikan karakteristik kompetensi dasar, yaitu merupakan pernyataan tentang pencapaian hasil yang diinginkan, tidak ada ketentuan waktu yang spesifik untuk mencapai kompetensi dasar, memuat petunjuk tentang cara mencapai prestasi, tidak bersifat permanen, memiliki derajat kepentingan yang sama, dan dirumuskan luas yang bisa dicapai oleh setiap mata pelajaran.

Kemudian untuk penetapan materi atau pokok bahasan pada setiap mata pelajaran, para perancang kurikulum bertugas menetapkan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai kompetensi pada masing-masing mata pelajaran. Perlu diperhatikan dalam hal ini adalah materi setiap mata pelajaran berupa bahan pembelajaran yang terdiri dari bahan kajian atau topik-topik pelajaran yang dapat dikaji oleh peserta didik dalam proses pembelajaran, materi setiap mata pelajaran mengacu pada pencapaian kompetensi dasar masing- masing satuan

---

<sup>16</sup> Rusman, *Manajemen Kurikulum*, hlm. 125

pendidikan, materi setiap mata pelajaran diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

c. Perencanaan kegiatan pembelajaran

Perencanaan kegiatan pembelajaran disini dipahami sebagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka implementasi pembelajaran yang terdiri atas menyusun indikator pencapaian kompetensi, menentukan materi, menentukan strategi pembelajaran, dan menetapkan alat evaluasi pembelajaran yang akan digunakan. Adapun pihak yang bertugas untuk membuat perencanaan kegiatan pembelajaran ini adalah para guru.

Indikator pencapaian kompetensi adalah rumusan yang menggambarkan bahwa siswa memiliki kompetensi dalam berfikir, bersikap, dan bertindak setelah menyelesaikan mata pelajaran tertentu.<sup>17</sup> Dengan indikator pencapaian kompetensi sangat bermanfaat bagi guru maupun peserta didik. Manfaat bagi guru antara lain: untuk memilih strategi pembelajaran yang tepat, memilih tehnik pengukuran dan evaluasi yang cocok, dan lain-lain. Sedangkan manfaat untuk peserta didik antara lain mengetahui harapan guru secara jelas, menjadi pedoman untuk fokus belajar, mengukur keberhasilan siswa sesuai indikator.

Langkah kedua adalah menentukan materi yang akan disampaikan. Dalam hal ini guru sebagai perancang kurikulum bertugas menentukan pokok-pokok materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Setiap materi pelajaran diberikan uraian singkat dengan tujuan agar memudahkan guru dalam menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik. Untuk menambah wawasan guru dan kompetensi akademisnya, maka

---

<sup>17</sup> Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi : Konsep, Karakteristik dan Implementasi*, Rosda Karya, Bandung, 2003, hlm. 181

hendaknya guru diberi kesempatan untuk aktif dalam kegiatan seminar, diskusi, konferensi dan juga pelatihan-pelatihan.

Langkah selanjutnya adalah menentukan metode atau strategi pembelajaran yang akan digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik dalam rangka mencapai yang telah ditetapkan. Metode atau strategi pembelajaran menempati fungsi yang penting dalam kurikulum, karena memuat yang perlu dikerjakan oleh guru dan peserta didik. Sehingga penyusunannya berdasarkan analisa tugas yang mengacu pada kompetensi dan indikatornya dengan memperhatikan perilaku awal peserta didik. Misalkan metode ceramah digunakan guru untuk pendekatan yang berpusat pada mata pelajaran, metode pembelajaran aktif digunakan guru untuk pendekatan yang berpusat pada peserta didik, metode survei atau karyawisata digunakan guru untuk pendekatan yang berorientasi pada kehidupan masyarakat, dan lain- lain.

Langkah yang terakhir adalah menetapkan alat evaluasi pembelajaran yang akan digunakan. Dalam hal ini adalah tugas guru dalam menetapkan alat evaluasi pembelajaran baik sebelum, selama, dan setelah mengikuti proses pembelajaran. Alat evaluasi yang dipilih guru adalah dalam bentuk tes dan non tes. Bentuk tes ada tiga, yaitu tes obyektif (bentuk tes mengandung jawaban yang harus dipilih oleh peserta tes, seperti : pilihan ganda, menjodohkan, dan benar atau salah), tes subyektif atau tes esai (butir soal yang mengandung pertanyaan atau tugas yang jawabannya harus dilakukan dengan cara mengekspresikan pikiran peserta tes, misal: tes esai bebas dan tes esai terbatas).<sup>18</sup> Kemudian bentuk non tes seperti portofolio, skala sikap, partisipasi, kehadiran dan lain- lain.

---

<sup>18</sup> Eko Putro Widoyoko, *Evaluasi Program Pembelajaran*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, CetI, hlm. 49-78.



### 3. Implementasi Manajemen Kurikulum Muatan Lokal

#### a. Pentingnya implementasi kurikulum muatan lokal.

Salah satu sasaran dari kebijakan desentralisasi pendidikan adalah kemandirian setiap satuan pendidikan, termasuk dalam implementasi serta pengembangan kurikulum. Dalam hal ini, pemerintah hanya menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum, sedangkan dalam pengembangannya diserahkan kepada masing-masing satuan pendidikan. Secara terperinci Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 38 Ayat (1) dan (2) menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah.
- 2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/Madrasah di bawah koordinasi dan *supervise* dinas pendidikan atau kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan Provinsi untuk pendidikan menengah.<sup>19</sup>

Secara garis besar beberapa kegiatan berkenaan dengan fungsi-fungsi manajemen kurikulum perlu dirumuskan oleh satuan pendidikan, khususnya terhadap langkah-langkah pelaksanaan dan implementasi kurikulum tersebut. Di antara langkah- langkah pelaksanaan serta implementasi kurikulum yang dapat dilakukan oleh satuan pendidikan/sekolah adalah melalui empat tahap, yaitu perencanaan, pengorganisasian, implementasi, dan evaluasi.<sup>20</sup>

#### 1) Perencanaan Kurikulum

Merencanakan pada dasarnya menentukan kegiatan yang hendak dilakukan pada masa depan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengatur berbagai sumber daya agar hasil yang dicapai

---

<sup>19</sup> Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Citra Umbara, Bandung, 2010, hlm. 20

<sup>20</sup> Asep Sudarsyah dan Diding Nurdin, *Manajemen Implementasi Kurikulum, dalam Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI*, Bandung, Alfabeta, 2009, hlm. 196

sesuai dengan yang diharapkan. Perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien dan seefektif mungkin.

Perencanaan merupakan rangkaian kegiatan pertama dalam proses manajemen. Perencanaan kurikulum adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa kearah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan telah terjadi pada diri siswa.

Perencanaan kurikulum ini berfungsi sebagai pedoman atau alat manajemen yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber individu yang diperlukan, media pembelajaran yang digunakan, tindakan-tindakan yang perlu dilakukan, sumber biaya, tenaga dan sarana yang diperlukan, sistem monitoring dan evaluasi, peran unsur-unsur ketenagaan untuk mencapai tujuan manajemen lembaga pendidikan. Di samping itu, perencanaan kurikulum juga berfungsi sebagai pendorong untuk melaksanakan sistem pendidikan sehingga mencapai hasil optimal.<sup>21</sup>

Perencanaan kurikulum berkaitan dengan bagaimana materi pelajaran disusun sehingga peserta didik atau siswa memperoleh pengalaman belajar untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Semua materi dan kegiatan belajar perlu direncanakan dan disusun sebaik-baiknya agar terbentuk program belajar mengajar yang sistematis. Oleh karena itu guru sebagai manajer pembelajaran harus melakukan berbagai pilihan menuju tercapainya tujuan. Guru harus mampu mengambil keputusan yang tepat untuk mengelola berbagai sumber, baik sumber daya, sumber dana, maupun sumber belajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yakni materi yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh siswa sehingga

---

<sup>21</sup> Rusman, *Manajemen Kurikulum*, hlm. 21

siswa memahami apa yang telah diajarkan. Manfaat perencanaan adalah sebagai berikut :

- a) Agar kegiatan-kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan tertentu, tertib dan lancar.
- b) Mendorong suatu pelaksanaan kegiatan organisasi secara produktif.
- c) Mengusahakan penggunaan alat-alat dan sumber-sumber lainnya secara efisien dan benar-benar mendukung bagi pencapaian tujuan organisasi.
- d) Memberikan gambaran yang lengkap bagi seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan.
- e) Dapat memberikan petunjuk bagi setiap personel, khususnya pemimpin organisasi untuk mengadakan pengawasan dan menilai setiap kegiatan yang dilakukan, apakah sudah sesuai dengan harapan-harapan sebelumnya.
- f) Selanjutnya para administrator dapat melakukan pembinaan organisasi secara terarah sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan.<sup>22</sup>

## 2) Pengorganisasian Kurikulum

Organisasi adalah suatu sistem, mempunyai struktur dan perencanaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran, didalamnya orang-orang bekerja dan berhubungan satu sama lain dengan suatu cara yang terkoordinasi dan kooperatif guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Louis A. Allen organisasi dipandang sebagai “identifikasi dan pengelompokan pekerja atau menetapkan data kerja bagi tercapainya tujuan pekerjaan agar mereka bekerjasama lebih efektif untuk mencapai tujuan bersama.

Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat As- shaff ayat 4 yaitu:

---

<sup>22</sup> M. Arif Khoiruddin, *Manajemen Kurikulum Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*, Volume 24, Th 2013, hlm. 64

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُورٌ

Terjemahnya: *Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalanNya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.* (Q.S Ash-Shaff ayat 4).<sup>23</sup>

Pengorganisasian ini merupakan langkah pertama ke arah pelaksanaan yang telah tersusun sebelumnya. Pelaksanaan fungsi pengorganisasian ini akan menghasilkan suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan menurut rencana yang telah ditentukan pula. Sukses tidaknya manajemen dalam melaksanakan fungsi pengorganisasian dapat dinilai dari kemampuannya untuk menciptakan suatu organisasi yang baik

Pengorganisasi kurikulum sangat terkait dengan pengaturan bahan pelajaran yang ada dalam kurikulum, sehingga dalam hal ini, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengorganisasian kurikulum, diantaranya:

- a) Ruang lingkup dan urutan bahan pelajaran; dalam hal ini yang menjadi pertimbangan dalam penentuan materi pelajaran adalah adanya integrasi antara aspek masyarakat
- b) Kontinuitas kurikulum; dalam hal ini yang perlu diperhatikan dalam pengorganisasian kurikulum adalah yang berkaitan dengan substansi bahan yang dipelajari siswa
- c) Keseimbangan bahan pelajaran; dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian bahan pelajaran dengan perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan yang terus terjadi.
- d) Alokasi waktu; dalam hal ini yang menjadi perhatian adalah alokasi waktu yang dibutuhkan dalam kurikulum harus sesuai dengan jumlah materi yang disediakan. Maka penetapan ini,

---

<sup>23</sup> Departemen RI, *Alquran dan terjemah*, Al kalim, Tangerang Selatan, 2011. hlm. 552

jumlah jam tatap muka masing-masing pelajaran merupakan hal yang terpenting sebelum menetapkan bahan pelajaran.<sup>24</sup>

Pada tahap pengorganisasian ini pula tugas wakil kepala urusan kurikulum mengatur pembagian tugas mengajar, penyusunan jadwal pelajaran dan kegiatan ekstra kurikuler dalam rangkaian kegiatan sebagai berikut:

- a) Pembagian tugas mengajar dan tugas lain secara merata sesuai keahlian dan minat guru. Hal itu dapat meningkatkan motivasi kerja, kepuasan, keamanan, dan mendukung kenaikan pangkat.
  - b) Penyusunan jadwal pelajaran diupayakan agar guru mengajar maksimal 5 hari dalam satu minggu, sehingga ada waktu untuk pertemuan MGMP atau istirahat.
  - c) Penyusunan jadwal kegiatan perbaikan dan pengayaan bagi siswa yang belum tuntas penugasan terhadap bahan ajar.
  - d) Penyusunan jadwal kegiatan ekstra kurikuler. Kegiatan ini perlu untuk mendukung kegiatan kurikuler dan kegiatan lain yang mengarah kepada aspek peningkatan keimanan dan ketakwaan, kepribadian, kepemimpinan dan ketrampilan tertentu.
  - e) Penyusunan jadwal penyegaran guru. Kegiatan ini dimaksudkan untuk penyegaran informasi pengetahuan guru tentang IPTEK dan atau model pembelajaran baru dalam pemanfaatan hari libur sekolah
- 3) Pelaksanaan Kurikulum

Implementasi kurikulum merupakan penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya, kemudian diujicobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan, sambil senantiasa dilakukan penyesuaian terhadap situasi lapangan dan karakteristik peserta didik, baik perkembangan intelektual, emosional, serta fisiknya. Implementasi ini juga

---

<sup>24</sup> Rusman, *Ibid*, hlm.60-61



sekaligus merupakan penelitian lapangan untuk keperluan validasi sistem kurikulum itu sendiri.<sup>25</sup>

Maka dalam hal ini, pembelajaran di dalam kelas merupakan tempat yang tepat untuk melaksanakan dan menguji validasi kurikulum. Dalam kegiatan pembelajaran semua konsep, prinsip, nilai, pengetahuan, metode, alat, dan kemampuan guru diuji dalam bentuk perbuatan, yang akan mewujudkan bentuk kurikulum yang nyata.

Perwujudan konsep, prinsip, dan aspek-aspek kurikulum tersebut seluruhnya terletak pada kemampuan guru sebagai implementator kurikulum. Oleh karena itu, gurulah kunci pemegang pelaksana dan keberhasilan kurikulum. Gurulah yang bertindak sebagai perencana, pelaksana, penilai, dan pengembang kurikulum yang sebenarnya.

Untuk itu, dalam mengelola implementasi kurikulum aspek kemampuan atau kompetensi guru perlu mendapat perhatian yang serius. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pada pasal 28 ayat 3 disebutkan bahwa kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi professional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial.<sup>26</sup>

Memperhatikan masalah kompetensi seorang guru secara professional merupakan suatu keharusan dalam mewujudkan sekolah berbasis pengetahuan, yaitu pemahaman tentang pembelajaran, kurikulum, dan perkembangan manusia termasuk gaya belajar. Pada umumnya di sekolah-sekolah yang memiliki guru dengan kompetensi professional akan menerapkan “pembelajaran dengan melakukan” untuk menggantikan cara

---

<sup>25</sup> Oemar Hamalik, *Pengembangan Kurikulum*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2016, hlm. 151

<sup>26</sup> M. Arif Khoiruddin, *Ibid*, hlm. 70

mengajar dimana guru hanya berbicara dan peserta didik hanya mendengarkan.<sup>27</sup> Metode yang digunakan oleh seorang guru tersebut sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini yang menuntut siswa aktif dan kreatif.

Kemudian dalam tahap pelaksanaan kurikulum atau proses belajar mengajar, tugas kepala sekolah adalah melakukan supervisi dengan tujuan untuk membantu guru merencanakan dan mengatasi kesulitan yang dihadapi. Dengan cara itu guru akan merasa didampingi sehingga akan meningkatkan semangat kerjanya. Untuk melaksanakan kurikulum itu sebaiknya diperlukan adanya kemauan dan kecakapan guru-guru dibawah bimbingan dan pengawasan kepala sekolah.

Beberapa hal yang merupakan tugas kepala sekolah sebagai supervisor dalam rangka pembinaan kurikulum disekolah antara lain:

- a) Kepala sekolah hendaknya dapat membimbing para guru untuk dapat meneliti dan memilih bahan pelajaran mana yang baik dan sesuai dengan perkembangan anak dan tuntutan dalam masyarakat.
- b) Membimbing dan mengawasi guru dalam memilih metode mengajar.
- c) Menyelenggarakan rapat-rapat dewan guru secara insidental dan periodik, khususnya untuk membicarakan kurikulum dan sebagainya.
- d) Mengadakan kunjungan kelas yang teratur, yaitu mengunjungi guru yang sedang mengajar untuk meneliti bagaimana cara atau metode mengajarnya.
- e) Setiap permulaan tahun ajaran baru, guru-guru diwajibkan menyusun prota, promes, silabus dan rencana pembelajaran.

---

<sup>27</sup> Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan: Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm.18

- f) Pada setiap akhir tahun ajaran, masing-masing guru mengadakan penilaian cara dan hasil kerjanya dengan meneliti kembali hal-hal yang pernah diajarkannya (sesuai silabus dan RP) untuk selanjutnya mengadakan perbaikan-perbaikan dalam tahun ajaran berikutnya.
- g) Setiap akhir tahun ajaran mengadakan penelitian bersama guru-guru mengenai situasi dan kondisi sekolah pada umumnya, dan usaha memperbaikinya sebagai pedoman dalam membuat program sekolah untuk tahun ajaran berikutnya.<sup>28</sup>

Oleh karena itu pelaksanaan kurikulum dititik beratkan pada berbagai usaha yang perlu dikerjakan dalam rangka pembinaan situasi dan proses belajar mengajar di sekolah tersebut. Dengan asumsi bahwa bila kurikulum di laksanakan dengan baik dan lancar maka diharapkan akan menghasilkan output atau lulusan yang baik.

#### 4) Evaluasi Kurikulum

Evaluasi kurikulum ialah suatu proses yang sistematis dari pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi/data untuk menentukan sejauh aman siswa telah mencapai tujuan pembelajaran.<sup>29</sup> Evaluasi kurikulum tersebut dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria. Indikator kinerja yang dievaluasi adalah efektivitas, efisiensi, relevansi, dan kelayakan (*feasibility*) program.

Evaluasi kurikulum merupakan salah satu bagian dari evaluasi pendidikan yang memusatkan perhatian pada program-program pendidikan untuk anak didik, lingkup evaluasi pendidikan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengembangan program. Evaluasi kurikulum memegang peranan penting baik dalam penentuan kebijaksanaan pendidikan pada umumnya, maupun pada pengambilan keputusan dalam kurikulum.

---

<sup>28</sup> M. Ngalim Purwanto, *Administrasi Pendidikan*, Mutiara, Jakarta, 1984, hlm. 84-85

<sup>29</sup> Rusman, *Manajemen*, hlm.91

Hasil-hasil evaluasi kurikulum juga dapat digunakan oleh guru-guru, kepala sekolah dan para pelaksana pendidikan lainnya, dalam memahami dan membantu perkembangan siswa, memilih bahan pelajaran, memilih metode dan alat-alat bantu pelajaran, cara penilaian serta fasilitas pendidikan lainnya.

Evaluasi kurikulum ini bukan hanya mengevaluasi hasil belajar siswa dan proses pembelajarannya, tetapi juga desain dan implementasi kurikulum, kemampuan dan unjuk kerja guru, kemampuan dan kemajuan siswa, sarana, fasilitas dan sumber belajar lainnya. Kurikulum sebagai program pendidikan atau program belajar untuk siswa memerlukan penilaian sebagai bahan balikan dan penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat, anak didik serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengawasan atau evaluasi ini bertujuan untuk menjamin kinerja yang dicapai sesuai dengan rencana atau tujuan yang ditetapkan. Dalam proses manajerial yang terakhir ini guru sebagai manajer pembelajaran harus mengambil langkah-langkah atau tindakan perbaikan apabila terdapat perbedaan yang signifikan atau adanya kesenjangan antara proses pembelajaran aktual di dalam kelas dengan yang telah direncanakan.<sup>30</sup>

Evaluasi kurikulum dapat dilakukan terhadap berbagai komponen pokok yang ada dalam kurikulum, di antara komponen yang dapat dievaluasi adalah sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Tujuan Pendidikan; merupakan evaluasi terhadap tujuan setiap mata pelajaran untuk mengetahui tingkat ketercapaiannya, baik terhadap tingkat perkembangan siswa maupun ketercapaiannya dengan visi-misi lembaga pendidikan.

---

<sup>30</sup> Departemen Agama, *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah*, Direktorat Jenderal Kelembagaan Pendidikan Islam, Jakarta, 2005. hlm. 28

- 2) Evaluasi terhadap Isi/Materi Kurikulum; merupakan evaluasi yang dilakukan terhadap seluruh pokok bahasan yang diberikan dalam setiap mata pelajaran untuk mengetahui keterseuaiannya dengan pengalaman, karakteristik lingkungan, serta perkembangan ilmu dan teknologi.
- 3) Evaluasi terhadap Strategi Pembelajaran; merupakan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru terutama di dalam kelas guna mengetahui apakah strategi pembelajaran yang dilaksanakan dapat berhasil dengan baik.
- 4) Evaluasi terhadap Program Penilaian; merupakan evaluasi terhadap program penilaian yang dilaksanakan guru selama pelaksanaan pembelajaran baik secara harian, mingguan, semester, maupun penilaian akhir tahun pembelajaran.

b. Prinsip-prinsip implementasi kurikulum muatan lokal

Kurikulum merupakan segala rancangan pendidikan yang merangkum semua pengalaman belajar yang disediakan bagi siswa disekolah. Sekolah merupakan tempat untuk melaksanakan dan menguji kurikulum. segala konsep, prinsip, nilai, pengetahuan, metode, alat dan pengaplikasian kemampuan guru diuji dalam bentuk perbuatan untuk selanjutnya dinyatakan dalam kurikulum.<sup>31</sup> Implementasi kurikulum mempunyai prinsip yang mendasari pelaksanaannya, yakni prinsip secara umum dan secara khusus.<sup>32</sup>

1) Prinsip-prinsip umum

Ada beberapa prinsip umum dalam implementasi pengembangan kurikulum, yakni prinsip relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis dan prinsip efektivitas. Kurikulum hendaknya berdasar pada empat aspek utama (tujuan, isi, pengalaman belajar dan penilaian). Interealisasi dari keempat dasar tersebut harus sejalan dan diperhatikan dalam implementasi kurikulum.

---

<sup>31</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Dan Praktek*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1997, hlm. 150

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 152-154



## 2) Prinsip-prinsip Khusus

Ada beberapa prinsip khusus dalam pengembangan kurikulum, yaitu :

- a) Berkenaan dengan tujuan belajar
- b) Berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan
- c) Berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar
- d) Berkenaan dengan pemilihan media belajar
- e) Berkenaan dengan pemilihan penilaian belajar.

## c. Kendala-kendala dalam implementasi kurikulum muatan lokal

Kurikulum muatan lokal termasuk kebijakan pemerintah yang menindaklanjuti dari adanya desentralisasi pendidikan. Layaknya kebijakan umum lainnya, yang dikeluarkan untuk banyak orang dari berbagai kalangan, maka dalam implementasi kurikulum muatan lokal ada beberapa kendala yang tidak bisa dianggap remeh, yaitu:

- 1) Kurangnya minat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran kurikulum muatan lokal dan juga kenyataan bahwa kebutuhan peserta didik sangat heterogen, merupakan kendala yang datang dari diri peserta didik (internal) yang membutuhkan penanganan dengan segera. Adanya kendala ini dikarenakan perbedaan latar belakang peserta didik, baik menyangkut keadaan keluarga, karakter maupun cita-cita atau impian dari peserta didik. Inilah yang kemudian menentukan kuatnya motivasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran muatan lokal.
- 2) Minimnya jumlah guru secara kuantitas maupun kualitas untuk mengasuh mata pelajaran muatan lokal, merupakan kendala yang juga sangat mempengaruhi kelancaran implementasi kurikulum muatan lokal. Hal ini berkaitan dengan peran seorang guru dalam kegiatan pembelajaran di sekolah/Madrasah.
- 3) Sarana dan prasarana belum memadai untuk mengadakan muatan lokal, dan minimnya dana yang mendukung kegiatan implementasi kurikulum muatan lokal. Keberadaan sarana dan prasarana menjadi

sangat penting guna memperlancar implementasi kurikulum muatan lokal, bahkan dalam setiap pembelajaran yang berlangsung. Ketiadaan sarana dan prasarana sebenarnya bisa diatasi dengan mudah jika ada dana yang mendukung untuk proses pengadaannya. Namun seringkali ketiadaan sarana dan prasarana juga disebabkan kurangnya dana yang dimiliki oleh sekolah/ Madrasah, sehingga kebutuhan untuk menjaga agar jalannya proses belajar mengajar tidak terganjal akan lebih diprioritaskan dari pada pengadaan sarana dan prasarana dalam upaya menunjang keberhasilan pembelajaran.

- 4) Kurikulum muatan lokal yang isinya disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan setempatnya merupakan sebuah kebijakan yang sangat bermanfaat. Namun menjadi kendala tersendiri jika ada peserta didik pindahan dari luar daerah yang tentu saja berlainan mata pelajaran muatan lokalnya. Selain menyulitkan peserta didik dalam belajarnya, hal ini juga dapat menjadi kendala dalam perolehan nilai peserta didik tersebut pada mata pelajaran muatan lokal.<sup>33</sup>

- d. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala- kendala dalam implementasi kurikulum muatan lokal

Melihat beberapa kendala dalam implementasi kurikulum muatan lokal yang telah diuraikan di atas, maka pemerintah juga sedang melakukan beberapa upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu:

- 1) Menambah anggaran dana untuk implementasi kurikulum muatan lokal, karena dana merupakan nafas terpenting dalam menyokong kelancaran implementasi suatu program. Keberadaan dana tersebut bisa mengatasi beberapa kendala sekaligus seperti, menambah sarana dan prasarana yang ada, sehingga pembelajaran tidak lagi monoton. Hal ini tentu saja bisa mengatasi kendala lainnya yaitu

---

<sup>33</sup> Dakir, *Ibid*, hlm. 108

menambah minat peserta didik untuk mengikuti kegiatan implementasi kurikulum muatan lokal.

- 2) Mengadakan penataran bagi calon guru bidang studi muatan lokal, hal ini dikarenakan minimnya instansi pendidikan yang secara khusus mengajarkan beberapa materi muatan lokal di negeri ini. Dengan demikian, kualitas/ profesionalisme guru muatan lokal semakin meningkat dan akan berimbas pada kesuksesan dalam pencapaian tujuan dikeluarkannya kebijakan kurikulum muatan lokal tersebut.<sup>34</sup>

#### **4. Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal di Madrasah**

Kebijakan desentralisasi pendidikan, yang di dalamnya memberi kesempatan yang luas dalam inovasi kurikulum muatan lokal, tentu masih membutuhkan kerja keras dan waktu sebelum pada akhirnya memberikan manfaat nyata terhadap peningkatan performansi pendidikan di Madrasah.

Sebagaimana diungkapkan pada bagian sebelumnya, kurikulum muatan lokal tidak dapat dipisahkan dari upaya menjembatani peserta didik dengan tatanan sosial yang melingkupinya. Sehubungan dengan hal tersebut, muatan lokal yang diterapkan dalam pendidikan di Madrasah juga senantiasa berjalan untuk mewariskan dan mentransformasikan nilai-nilai budaya islami yang telah melekat dalam kesadaran terdalam masyarakat lokal.

- a. Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal di Madrasah dengan Cara Internalisasi ke Seluruh Mata Pelajaran.

Sebagaimana diketahui bahwa kurikulum Madrasah di Indonesia menggunakan Kurikulum 2013. Salah satu isi struktur kurikulum adalah mata pelajaran. Mata pelajaran yang dimaksud adalah ;

- 1) Kelompok mata pelajaran agama yang meliputi Alquran Hadits, akidah akhlak, Fiqh, Sejarah Kebudayaan Islam dan bahasa Arab.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 109-110

- 2) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian yang terdiri dari Pendidikan Kewarganegaraan dan bahasa Indonesia.
- 3) Kelompok mata pelajaran Ilmu pengetahuan dan teknologi yang meliputi mata pelajaran matematika, IPS dan IPA.
- 4) Kelompok mata pelajaran estetika berupa pendidikan seni dan keterampilan kelompok mata pelajaran jasmani olahraga dan kesehatan.<sup>35</sup>

Pengembangan muatan lokal pada mata pelajaran rumpun agama Islam dapat dilakukan dengan cara mengembangkan indikator-indikator yang diawali dengan budaya, tradisi dan nilai lokal, nasional dan diakhiri budaya global. Kelompok mata pelajaran agama Islam yang meliputi Alquran Hadis, akidah akhlak, Fiqh, Sejarah Kebudayaan Islam dan bahasa Arab dapat dikembangkan dengan cara berikut ini :

**Tabel. 2.1**

**Model Pengembangan Indikator Kurikulum Muatan lokal**

No	Nama Rumpun Mata Pelajaran Agama Islam	Indikator
1	Sejarah Kebudayaan Islam	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Siswa memahami kerajaan-kerajaan Islam yang berkembang pada masa awal daerah tertentu.</li> <li>b. Siswa memahami tokoh penyebar awal mula masuknya Islam di daerah tertentu</li> <li>c. Siswa memahami kapan masuknya Islam di daerah tertentu</li> <li>d. Siswa memahami perkembangan Islam daerah tertentu</li> <li>e. Siswa memahami tokoh Islam yang berjasah menyebarkan dan mengembangkan Islam di daerah tertentu.</li> </ol>

<sup>35</sup> Muhaimin, *Pengembangan Model*, hlm. 228-229

2	Alqur'an Hadits	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Siswa memahami kitab-kitab Alquran dan Hadits terjemahan bahasa lokal</li> <li>b. Siswa mengenal kitab-kitab tafsir dan hadits karya masyarakat lokal .</li> <li>c. Siswa menggali kitab tafsir dan hadits yang ditulis oleh ahli tafsir lokal</li> </ul>
3	Aqidah Ahlak	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Siswa memahami karakteristik keyakinan masyarakat lokal</li> <li>b. Siswa memahami perilaku keagamaan masyarakat lokal</li> <li>c. Siswa mengenal tradisi dan budaya masyarakat lokal yang relevan dengan ajaran agama Islam.</li> <li>d. Siswa memahami berbagai aliran atau organisasi keislaman yang berkembang pada masyarakat lokal.</li> <li>e. Siswa menerapkan tradisi keislaman yang berkembang pada masyarakat.</li> </ul>
4	Fiqh	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Siswa memahami mazhab yang dianut oleh masyarakat lokal.</li> <li>b. Siswa mengenal kitab kitab fiqh karya masyarakat atau ulama lokal.</li> <li>c. Siswa memahami bentuk penerapan hukum Islam pada masyarakat lokal</li> <li>d. Siswa mempraktekkan hukum adat lokal yang tidak bertentangan dengan Islam</li> </ul>

- b. Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal Melalui Mata Pelajaran Muatan Lokal Tertentu Atau Program Tertentu Yang Terpisah Dengan Mata Pelajaran.

Pengembangan kurikulum muatan lokal dapat pula dilakukan melalui pemilihan dan penetapan mata pelajaran muatan lokal yang masih menjadi bagian kurikuler. Setiap madrasah dapat



mengembangkan mata pelajaran muatan lokal yang diberlakukan secara menyeluruh mulai dari kelas terendah hingga kelas tertinggi.

Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar dan Indikator dapat dikembangkan oleh masing-masing madrasah akan sesuai kebutuhan madrasah yang bersangkutan. Dalam pengembangan muatan lokal perlu memperhatikan hal-hal berikut ini;

- 1) Substansi yang akan dikembangkan, materinya tidak menjadi bagian dari kelompok mata pelajaran yang telah dikemukakan.
- 2) Merupakan mata pelajaran wajib yang diselenggarakan melalui pembelajaran intra kurikuler atau masuk dalam struktur kurikulum.
- 3) Bentuk penilaiannya kuantitatif.
- 4) Madrasah harus menyusun standar kompetensi, kompetensi dasar dan silabus.
- 5) Substansinya dapat berupa program keterampilan produk dan jasa.
- 6) Setiap madrasah harus mengembangkan lebih dari satu jenis muatan lokal.
- 7) Peserta didik dapat mengikuti lebih dari satu muatan lokal.<sup>36</sup>

## **B. Hasil Penelitian Terdahulu**

Berawal dari sejumlah pembahasan tentang manajemen kurikulum sebenarnya bukanlah tema yang baru. Ada sejumlah peneliti yang telah membahas hal-hal yang berkaitan dengan manajemen kurikulum khususnya dalam manajemen muatan lokal.

Telah dilakukan oleh sejumlah peneliti sebelumnya tentang manajemen kurikulum muatan lokal dengan berbagai keunikan dan perbedaan karakteristik muatan lokal yang masih sedikit dikaji. Diantaranya, Harisun NIM.113911125 Skripsi dengan judul "*Manajemen Kurikulum Pendidikan Sekolah Islam Salaf Pesantren Girikesumo Banyumeneng Mranggen Demak*" dalam skripsinya Harisun membahas tentang manajemen kurikulum pendidikan dan pesantren salaf. Kajiannya dilatarbelakangi oleh banyaknya

---

<sup>36</sup> Hunafa, Jurnal Studia Islamika, hlm. 12

kurikulum pendidikan dewasa ini yang berbasiskan pada kebutuhan pasar (global). Sedangkan pesantren salaf Girikesumo masih mempertahankan pendidikan berbasis agama Islam dengan tetap mempertahankan model salafinya.<sup>37</sup>

Berbeda dengan Harisun, peneliti lain yakni Ulfa Mariana pada tahun 2008 menyelesaikan skripsi penelitiannya dengan judul. “ *Implementasi Kurikulum Muatan Lokal di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Huda Turen Kabupaten Malang*, Penelitian tentang implementasi kurikulum muatan lokal di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Huda Turen Kabupaten Malang menemukan hasil bagaimana kurikulum muatan lokal di MTs. Miftahul Huda tersebut berjalan sesuai dengan prosedur dan arahan dari pemerintah dan dalam prosesnya berjalan dengan baik dan lancar. <sup>38</sup>

Penelitian selanjutnya mengenai muatan lokal juga dibahas oleh Siti Mariyam pada tahun 2007 dengan judul penelitiannya “*Penerapan Kurikulum Muatan Lokal Dalam Pembentukan Kepribadian Islam Siswa di MTsN Tambakberas Jombang.*” Penelitian ini difokuskan dalam pembahasan Pendidikan dapat berhasil apabila kurikulumnya disusun dengan baik yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya untuk pembentukan kepribadian islam peserta didik tidak hanya sebatas kurikulum inti saja, tetapi dibutuhkan juga kurikulum muatan lokal. Hal ini diperlukan untuk pengembangan program pendidikan yang sesuai dengan potensi daerah, minat dan kebutuhan peserta didik dan kebutuhan daerah. Berdasarkan latar belakang di atas MTsN Tambakberas sebagai lembaga pendidikan Islam yang berada ditengah-tengah masyarakat yang masih kental keberagamaanya merasa perlu melaksanakan kurikulum muatan lokal yang berupa kajian kitab kuning dalam pembentukan kepribadian Islam.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Harisun, Manajemen Kurikulum Pendidikan Sekolah Islam Salaf Pesantren Girikesumo Banyumeneng Mranggen Demak, *Skripsi*, UIN Walisongo Semarang, 2015, hlm. 1-6

<sup>38</sup> Ulfa Mariana, Implementasi Kurikulum Muatan Lokal di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Huda Turen Kabupaten Malang, *Skripsi*, UIN Malang, 2008, hlm. 1-9

<sup>39</sup> Siti Mariyam, Penerapan Kurikulum Muatan Lokal Dalam Pembentukan Kepribadian Islam Siswa di MTsN Tambakberas Jombang, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Malang, 2007. hlm 1-7

Maliya Mubarakah, pada tahun 2008 juga melakukan penelitian tentang *“Strategi Manajemen Kurikulum Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan (Studi Kasus di Madrasah Tsanawiyah Sunan Kalijogo Karangbesuki Sukun Malang).”* Membahas mengenai arti pendidikan Pendidikan yang merupakan salah satu faktor utama menjadikan manusia sebagai insan yang berkualitas dan inovatif. Karena manusia dituntut untuk selalu melakukan inovasi dan pembaharuan serta memiliki pengetahuan, daya cipta dan keterampilan hidup yang lebih baik. Dalam bidang pendidikan, peranan manajemen sangat penting dalam menentukan kualitas sebuah lembaga pendidikan terutama manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah kegiatan pengaturan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan atau evaluasi agar program pendidikan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.<sup>40</sup>

Penelitian lain menyebutkan Muhammad Nasir Pascasarjana STAIN Samarinda Kalimantan Timur, bahwa Muhammad Nasir mengkaji tentang pengembangan kurikulum muatan lokal dalam konteks pendidikan islam di madrasah. Menjelaskan salah satu unsur yang harus dilestarikan dan dijaga melalui kegiatan pendidikan adalah nilai, tradisi, budaya, keterampilan dan konsep yang berlaku pada masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah menggulirkan perubahan kurikulum dengan menambahkan mata pelajaran muatan lokal. Melalui pembelajaran muatan lokal diharapkan peserta didik, tidak saja memiliki pengetahuan akademis berupa pengetahuan yang bersifat global sebagaimana diharapkan, tetapi juga mempunyai kepedulian terhadap nilai-nilai sosio-kultural yang melingkupi peserta didik. Secara konsep, kurikulum berbasis muatan lokal terdiri dari dua bentuk. Bentuk pertama bersifat melekat ke seluruh mata pelajaran, dan bentuk kedua berupa kegiatan tersendiri yang tidak ada kaitannya dengan mata pelajaran.

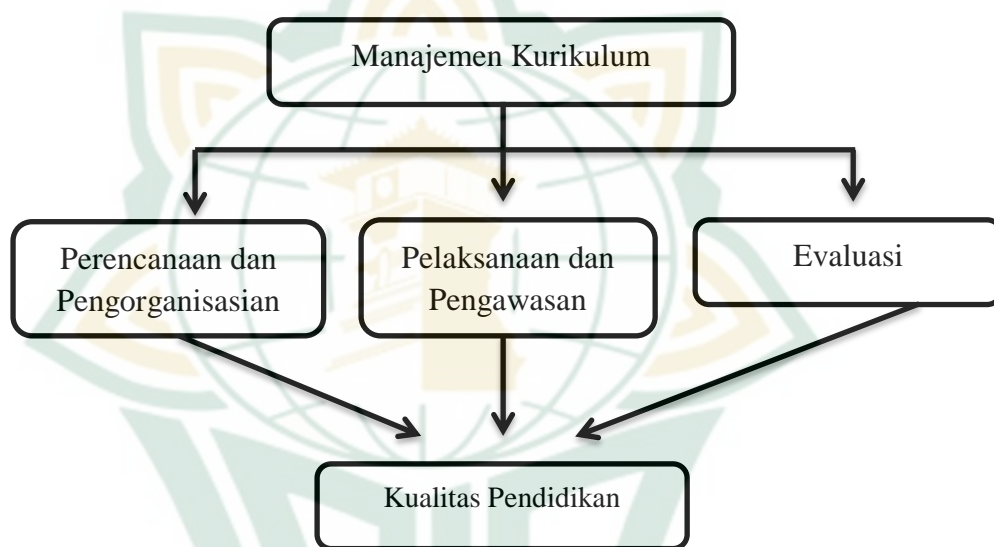
---

<sup>40</sup> Maliya Mubarakah , Strategi Manajemen Kurikulum Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan (Studi Kasus di Madrasah Tsanawiyah Sunan Kalijogo Karangbesuki Sukun Malang, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Malang, Tahun 2008. hlm. 1-7

Tulisan ini, berusaha mengeksplor bagaimana model dan pelaksanaan kurikulum berbasis muatan lokal di madrasah.<sup>41</sup>

### C. Kerangka Berpikir

Penentuan kerangka berpikir dalam penelitian, ada hal yang menjadi beberapa fokus sebagai penelitian manajemen kurikulum dan upaya perkembangannya terhadap muatan lokal.



**Bagan, 2.1**

#### **Kerangka Berpikir Manajemen Kurikulum Muatan Lokal**

Bagan tersebut menjelaskan pentingnya manajemen dalam kelembagaan, khususnya dalam lembaga pendidikan formal sekolah ataupun Madrasah. Dilihat dari kegunaan yaitu sebagai perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi. Manajemen kurikulum yang kemudian diimplementasikan dalam kurikulum nasional ataupun yang berbasis kurikulum Madrasah.

Implementasi kurikulum merupakan penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya, kemudian diujicobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan, sambil

<sup>41</sup> Muhammad Natsir, Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Dalam Konteks Pendidikan Islam Di Madrasah, *Jurnal Hunafa*, Vol. 10, No. 1, juni 2013, hlm. 1-2

senantiasa dilakukan penyesuaian terhadap situasi lapangan dan karakteristik peserta didik, baik perkembangan intelektual, emosional, serta fisiknya. Implementasi ini juga sekaligus merupakan penelitian lapangan untuk keperluan validasi sistem kurikulum. Kurikulum muatan lokal adalah upaya dari Madrasah untuk memberikan warna dan juga kekhasan dari Madrasah tersebut sesuai dengan penjelasan kurikulum muatan lokal didalam sistem pendidikan nasional.

Muatan lokal sebagai bentuk materi tambahan bersifat wajib yang dikembangkan oleh Madrasah sendiri dengan masing-masing sekolah berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan siswa dan hubungannya dengan masyarakat luas. Penerapan muatan lokal sangat penting khususnya muatan lokal dilingkungan Madrasah guna menunjang pelajaran Agama yang disediakan oleh kurikulum nasional. Muatan lokal ditujukan sebagai bentuk tambahan yang harus ada sesuai dengan kebutuhan siswa dan perlu adanya perencanaan, pengawasan, pengorganisasian dan evaluasi agar sesuai dengan sasaran.